

**TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP IMPLEMENTASI
AKAD MUSYARAKAH PADA BMT ALFA NUSA KEBUMEN**



NASKAH ARTIKEL PUBLIKASI

Diajukan kepada Program Studi Muamalat (Syari'ah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelara Sarjana Syari'ah (S.Sy.)

Oleh:
Toha Idi Sambodo
NIM : I 000 090 026
NIRM : 09/X/02.1.2/0119

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing Skripsi/Tugas Akhir:

Nama : Drs. Syarafuddin HZ, M.Ag
Sebagai : Pembimbing I
NIK : 493

Nama : Nurul Huda, M.Ag
Sebagai : Pembimbing II
NIK : 197608292005011002

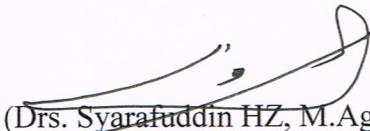
Telah membaca dan mencermati Naskah Artikel Publikasi Ilmiah yang merupakan ringkasan Skripsi (Tugas Akhir) dari mahasiswa:

Nama : Toha Idi Sambodo
NIM : I000090026
Program Studi : Muamalat (Syariah)
Judul Skripsi : TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 08/DSN-
MUI/IV/2000 TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD
MUSYARAKAH PADA BMT ALFA NUSA KEBUMEN


Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.
Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 11 April 2015

Penguji I


(Drs. Syarafuddin HZ, M.Ag.)

Penguji II


(Nurul Huda, M.Ag.)

**TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP IMPLEMENTASI
AKAD MUSYARAKAH PADA BMT ALFA NUSA KEBUMEN**

Toha Idi Sambodo
I 000 090 026
Fakultas Agama Islam

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap implementasi akad *Musyarakah* pada BMT Alfa Nusa Kebumen dan menjelaskan aplikasi akad *Musyarakah* di BMT Alfa Nusa Kebumen.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam hal ini mendeskripsikan bagi hasil akad *Musyarakah* BMT Alfa Nusa Kebumen serta aplikasinya sesuai atau tidak dengan yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan observasi, teknik wawancara dan dokumentasi yang mendukung berjalannya penelitian ini. Lalu dianalisis menggunakan metode analisis dan kualitatif dengan cara berpikir induktif menggambarkan atau menganalisis data yang diperoleh.

Pelaksanaan bagi hasil akad *Musyarakah* di BMT Alfa Nusa Kebumen Keuntungan dari hasil usaha dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan di awal antara pihak BMT Alfa Nusa Kebumen dengan anggota yang mengajukan pembiayaan akad *Musyarakah*. Seperti pembagian kerja yang dimana pihak BMT terlihat hanya sebagai pemberi dana, padahal akad *Musyarakah* adalah akad yang memerlukan kerjasama dua atau lebih pemilik modal, walaupun setiap mitra mempunyai porsi kerjanya masing-masing. Jika terjadi kerugian BMT Alfa Nusa Kebumen akan mengkalkulasikan seberapa besar kerugian, bila kerugian telah ditambah dengan jaminan masih kurang, maka pihak BMT akan menanggung sisa kerugian tersebut.

Jika terjadi persengketaan, BMT Alfa Nusa Kebumen mengambil langkah untuk bertindak lebih tegas dalam menyelesaikan sengketa yang telah terjadi antara kedua belah pihak setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa yang dimana penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kata Kunci: Fatwa DSN MUI, Akad *Musyarakah* dan BMT Alfa Nusa Kebumen.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah air, berkembang pula jumlah DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang ada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyak dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah.

Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga

keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN.¹

Pemerataan pertumbuhan ekonomi bisa sampai lapisan yang paling bawah, (*grass road*), khususnya wilayah Kebumen dan sekitarnya, maka didirikan sebuah jasa lembaga keuangan syariah yang orientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah dengan sistem operasionalnya berdasarkan pada Syariah Islam. Koperasi jasa keuangan tersebut bernama KJKS BMT Alfa Nusa Kebumen.

Berdirinya KJKS BMT Alfa Nusa Kebumen ini membantu perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Hal ini terjadi karena adanya akad-akad pembiayaan yang

¹ Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan kantor Bank Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), hlm. 22.

mendorong berjalanya roda perokomonian. Salah satu akad yang digunakan adalah akad *Musyarakah*, akad ini bertumpu pada kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan sebuah usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan tidak hanya kontribusi dana melainkan usaha yang dilakukan bersama-sama dan keuntungan serta resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang yang di atas dan dikaji lebih dalam, maka dari pada itu penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

Apakah Impelmentasi Akad *Musyarakah* pada BMT Alfa Nusa Kebumen telah sesuai dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah Impelmentasi Akad *Musyarakah* pada BMT Alfa Nusa Kebumen telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000?

Manfaat Masalah

Dengan adanya pertanyaan rumusan masalah di atas. Maka manfaat yang ingin diperoleh:

1. Secara teoritis;
 - a. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan pengembangan kepada Dewan Syariah Nasional mengenai mekanisme bagi hasil akad *Musyarakah*.

- b. Memberikan sumbangsih dalam bentuk akademis kepada UMS yang sifatnya penerapan ilmu yang sudah didapat di dalam perkuliahan.
2. Secara praktis;
 - a. Masukan terhadap institusi yang terkait langsung dengan objek yang diteliti.
 - b. Untuk bahan atas referensi dalam menyikapi masalah-masalah berkaitan muamalah yang terjadi di masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya, di antaranya:

1. Retno Rusdiato (2012), dalam penelitiannya yang berjudul *Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Al-Bina*

Tasikmalaya, skripsi ini membahas pembiayaan *Musyarakah* antara pihak BMT dengan nasabah dalam mekanisme akad pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Al-Bina Tasikmalaya dari segi akad, objek akad. Sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN tentang *Musyarakah*, akan tetapi dalam prakteknya pihak BMT dalam menentukan hasil menggunakan perhitungan di awal sehingga muncul adanya ketidak sesuaian dalam keuntungan yang disepakati di awal oleh pihak BMT.

2. Neni Suryani (2013), dalam penelitiannya yang berjudul *Penerapan Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Pada Bank Muamalat Cabang Pontianak*, skripsi ini

membahas pada pembagian kerugian yang diterapkan pada Bank Muamalat sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Ini dilihat dari sistem pembagian kerugian yang diterapkan pada Bank Muamalat cabang Pontianak yang melihat dari aspek penyebab kerugian. Jika kerugian usaha berasal dari nasabah, maka bank tidak ikut bertanggung jawab dalam kerugian atas usaha tersebut. sebaliknya jika kerugian berasal dari bank, maka nasabah tidak ikut bertanggung jawab mengganti kerugian.

3. Khoirul Bakdiah (2008), dalam penelitiannya yang berjudul *Penerapan Pembiayaan Dengan Akad*

Mudharabah Dan Musyarakah (Studi Kasus Pada BMT- MMU Sidogiri Pasuruan), dari hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan akad mudharabah *Musyarakah* (sistem bagi hasil) di BMT-MMU Sidogiri dapat mewujudkan visi dan misi BMT yaitu terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dibidang sosial ekonomi dan dapat menanamkan pemahaman bahwa sistem bagi hasil adalah adil.

Tinjauan Teoritik

Fatwa

Fatwa adalah keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh mufti atau alim ulama tentang suatu

masalah.² Peran penting dalam dikeluarkannya sebuah fatwa adalah para ulama yang mengerti tentang hal syariat, dalam hal ini mengenai hukum-hukum muamalah.

Landasan Syariah mengeluarkan fatwa

- Al-Qur'an

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي
الْكَلَالَةِ ...

“Meraka memnita fatwa kepadamu (wahai Muhammad, mengenai masalah Kalalah), katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepadakamu dalam perkara kalalah itu.’” (QS. An-Nisa’ [4]: 176)

- Sunnah (Hadis)

مَنْ أَفْتَى بِفَتْيَا غَيْرِ ثَبَتٍ فَإِنَّهُ
إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ

“Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa kepastian (sumbernya), maka sesungguhnya dosanya ke atas orang yang memberi fatwa.” (Musnad Ahmad Ibnu Hanbal)³

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 424.

³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 8.

a. Dewan Syariah Nasional MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah⁴.

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/1999, salah satu yang menjadi tugas dan wewenang DSN ialah Mengeluarkan fatwa.⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah*.

Prinsip Bagi Hasil

a. akad *Musyarakah*

Dalam *Al-Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak

⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 4.

⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan ...*, hlm. 7.

atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

1) Dasar Hukum *Musyarakah*

Landasan syariah, yang pertama Al-Quran

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

“...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga...” (an-Nisaa’:12)

...وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ

عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ...

...dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...(Shaad: 24)

Dasar syariah tentang *Musyarakah*

dalam hadistnya yaitu:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكُنْ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ)

Artinya:

“Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah SAW. Bersabda “Allah SAW berfirman: “Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama seorang diantara mereka tidak khianat pada temannya. Apabila ada yang berkhianat, maka aku keluar dari mereka: (HR. Abu Dawud No. 2936)

Hadist qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.⁶

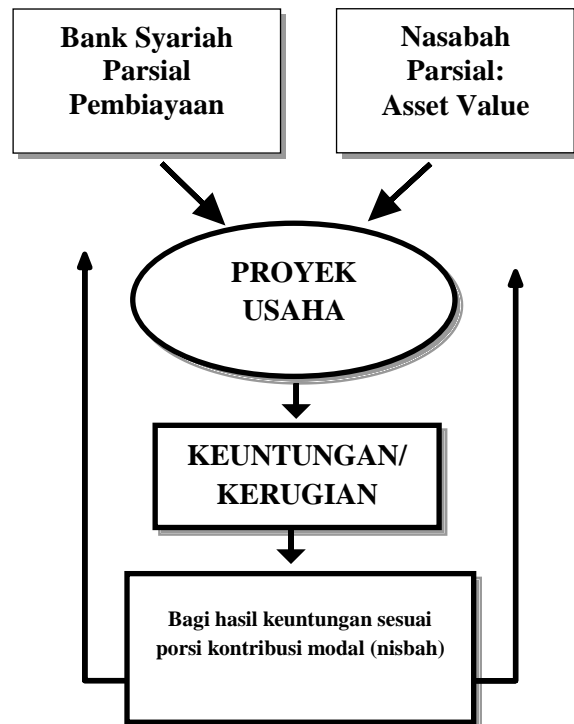
Bank syariah menerapkan prinsip-prinsip yang konsisten berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Hadits. Prinsip-prinsip bank syariah menyangkut beberapa permasalahan

⁶ Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Pratik* (Jakarta: Gema Insani, 2001-), hlm. 74.

pokok, antara lain: Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*), Prinsip Bagi Hasil (*profit sharing*), Prinsip Jual Beli (*At-tijarah*), Prinsip Sewa (*Al-ijarah*), dan Prinsip Jasa (*fee-based service*).⁷

Dalam akad *Musyarakah*, kedua belah pihak ikut andil dalam penyertaan modal (*equity partisipation*), dan masing-masing dapat pula terjun langsung secara bersama-sama dalam proses manajemen. Bila usaha yang dijalankan bersama mendapat untung, keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditentukan di muka atas dasar kesepakatan kedua pihak, secara proporsional, biasanya bergantung pada dirinya dalam proses manajemen. Namun bila usahanya merugi, kedua pihak secara bersama-sama menanggung kerugian

itu karena *Musyarakah* menganut azas ”*profit and loss sharing contract*”.⁸



Gambar 1. Skema Akad

Musyarakah menurut Syafi'i

Antonio.

b. Penerapan Bagi Hasil *Musyarakah*

Prinsip dasar operasional bank syariah adalah tidak mengenal

⁷ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis ...*, hlm. 9.

⁸ Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*(Yogyakarta: UII Press, 2002),hlm. 42.

konsep bunga dan kemitraan atau kerja sama (*mudhârabah* dan *musyâraakah*) dengan prinsip bagi hasil. Dalam bank syariah, peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.⁹

Pembiayaan yang melibatkan dana dari bank, biasanya bank tidak akan terlibat dalam pengelolaan usaha secara maksimal. Sehingga bisa jadi terdapat pelaksana usaha bukan merupakan salah satu dari pemilik dana

Berdasarkan pola ini dapat diilustrasikan kasus-kasus sebagai berikut:

Tabel 1. Pelaksana Usaha Bukan Merupakan Salah Satu dari Pemilik Dana.

Bulan ke	Perkiraan		
	Cicilan pokok (A)	Bagi Hasil (B)	Setoran (C=A+B)
1-12	5.000.000	500.000	5.500.000

Catatan:

1. Jumlah pembiayaan *shohibul mal* 1=Rp. 60.000.000,-
2. Jangka waktu 12 bulan
3. Perkiraan/proyeksi bagi hasil 12%p.a flat

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) serta penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif yang dimana menjelaskan dan menggambarkan karakteristik data yang diambil.

Penggunaan metode untuk mendekati masalah yang diteliti adalah pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan kerjasama dan pembagian

⁹ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 64.

hasil dari akad *Musyarakah* yang terdapat pada BMT Alfa Nusa Kebumen.

Peneliti mengambil tempat penelitian di BMT Alfa Nusa Kebumen yang beralamat di jalan Cendrawasih No. 9 Kebumen.

Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi disebut sebagai pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.¹⁰ Karena selama observasi tidak ada transaksi pembiayaan akad *Musyarakah* di BMT Alfa Nusa Kebumen, maka penulis berinisiatif melakukan transaksi pembiayaan akad *Musyarakah*.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian tanpa menggunakan tes. Sesuai tidaknya data yang diinginkan oleh sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek wawancara, bahan wawancara (dituangkan dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara)¹¹. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai beberapa narasumber seperti pihak BMT pada bagian pembiayaan *Musyarakah* BMT Alfa Nusa Kebumen.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang variabel berupa catatan, transkrip, buku, prestasi,

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 146.

¹¹ M Subana Dkk, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Setia Pustaka, 2011), hlm. 142.

notulen dan sebagainya.¹² Dalam hal ini penulis data mengenai dokumentasi berupa surat pengajuan pembiayaan, surat kontrak akad *Musyarakah* dan foto terkait berlangsungnya akad pembiayaan *Musyarakah*.

Metode Analisi Data

Dalam memperoleh hasil yang sesuai dengan materi dan tujuan dilakukannya penelitian, maka analisis yang dipergunakan adalah: metode analisis data kualitatif dengan cara berpikir induktif menggambarkan atau menganalisa data kualitatif yang diperoleh (data berupa kata atau kalimat bukan berbentuk angka-angka), dalam analisis induktif, *in* (di dalam), peneliti secara langsung berada ‘di dalam’ lokasi penelitian itu sendiri,

¹² Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 234.

sehingga simpulan diperoleh semata-mata dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan data.¹³

Penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan menggambarkan implementasi berlangsungnya akad pembiayaan *Musyarakah*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad pembiayaan *Musyarakah* garis besar ketentuan sebagai berikut:

- a) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum.

¹³ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya*, hlm 328.

c) Objek akad (meliputi modal, kerja keuntungan dan kerugian).

d) Biaya modal yang dipersengkatakan.

Pada BMT Alfa Nusa Kebumen mempunyai beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pernyataan ijab dan qabul akad *Musyarakah* dituangkan di dalam kontrak (akad) pembiayaan *Musyarakah*, yang menerangkan tentang:

- 1) Siapa sebagai pihak I dan pihak II,
- 2) Pengajuan pembiayaan modal kerja,
- 3) Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak,
- 4) Jaminan sebagai penguat amanah,
- 5) Keterlambatan pembayaran,
- 6) Dan keterikatan kedua belah pihak dengan penandatanganan

surat kotrak (akad) pembiayaan *Musyarakah*.

Namun dalam kontrak (akad) *Musyarakah* BMT Alfa Nusa Kebumen pasal 2 poin 5; pihak II berhak melakukan segala hal mengenai usahanya itu sesuai ketentuan syar'i dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa keikutsertaan pihak I dalam manajemen, kecuali dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan.¹⁴

Hal tersebut berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yaitu poin kerja;

- Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *Musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh

¹⁴ Kontrak (Akad) Pembiayaan *Musyarakah* BMT Alfa Nusa Kebumen.

melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *Musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan melalui kontrak.

Hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan BMT Alfa Nusa Kebumen, dapat mengetahui mekanisme bagi hasil akad *Musyarakah* sebagai berikut:

Besaran pokok pinjaman x nisbah bagi hasil
Berapa kali angsuran

Besaran pokok pinjaman akan dibagikan dengan berapa kali angsuran, kemudian akan dikalikan dengan nisbah bagi hasil yang telah

disepakati oleh kedua pihak, dari pihak anggota dengan pihak BMT Alfa Nusa Kebumen. Sehingga dapat menghasilkan besaran angsuran yang akan dibayarkan oleh pihak anggota sebagai pihak pemohon pembiayaan akad *Musyarakah* di BMT Alfa Nusa Kebumen.

Lalu dilihat dari mekanisme bagi hasil akad *Musyarakah* dengan perkiraan bagi hasil flat sebagai berikut:

Jumlah pembiayaan *shohibul mal* x nisbah bagi hasil
Jangka waktu setoran

Pada BMT Alfa Nusa Kebumen jika usaha bisnis yang dilakukan oleh anggota mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Jika terjadi kerugian BMT Alfa Nusa Kebumen yang menanggung resiko setelah dikurangi dengan adanya jaminan. BMT Alfa Nusa Kebumen tidak akan

menuntut pengembalian modal yang telah disepakati kedua belah pihak. BMT Alfa Nusa Kebumen tidak akan menuntut pengembalian modal jika kerugian yang dikalkulasikan ditambah jaminan masih kurang.

Pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, jika usaha yang dijalankan tak mendapatkan keuntungan tapi mendapatkan kerugian, maka kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing modal.¹⁵

Ketentuan lain di dalam akad *Musyarakah* yaitu adanya jaminan, jaminan ini menurut fatwa Dewan Syariah Nasional pada prinsipnya, tidak ada namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 90.

Di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional membuat keputusan dengan cara penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah kesepakatan tidak tercapai melalui musyawarah.¹⁶ KJKS BMT Alfa Nusa Kebumen mempunyai cara tersendiri menyelesaikan sengketa atau perselisihan yaitu dengan bertindak tegas setelah penyelesaian melalui musyawarah tidak tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap mekanisme

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 90.

bagi hasil akad *Musyarakah* pada BMT Alfa Nusa Kebumen sebagai berikut:

1. Aplikasi akad *Musyarakah* di BMT Alfa Nusa Kebumen masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Seperti pembagian kerja yang dimana pihak BMT sebagai pengawas dan pembinaan, padahal akad *Musyarakah* adalah akad yang memerlukan kerjasama dua atau lebih pemilik modal, walaupun setiap mitra mempunyai porsi kerjanya masing-masing.
2. Mekanisme bagi hasil BMT Alfa Nusa Kebumen sesuai dengan teori yang ada mengenai bagi hasil akad *Musyarakah* yaitu:

Jumlah pembiayaan *shohibul mal* x nibah bagi hasil
Jangka waktu setoran

Keuntungan dari hasil usaha dibagihasilkan sesuai dengan

kesepakatan di awal antara pihak BMT Alfa Nusa Kebumen dengan anggota yang mangajukan pembiayaan akad *Musyarakah*.

3. Hal yang terkait kerugian jika terjadi saat usaha tersebut berjalan pada BMT Alfa Nusa Kebumen, BMT akan menghitung kerugian yang diperoleh. Setelah itu akan dikurangi dengan jaminan yang telah disepakati di dalam kontrak. Namun jika masih ada kerugian maka pihak BMT akan menanggung sisa kerugian tersebut, hal ini berlaku bila pihak anggota memang tidak sanggup membayar kerugian.

4. Hal yang terkait kerugian jika terjadi saat usaha tersebut berjalan pada BMT Alfa Nusa Kebumen, BMT akan menghitung kerugian yang diperoleh. Setelah itu akan dikurangi dengan jaminan yang

telah disepakati di dalam kontrak. Namun jika masih ada kerugian maka pihak BMT akan menanggung sisa kerugian tersebut, hal ini berlaku bila pihak anggota memang tidak sanggup membayar kerugian.

Saran

Dengan selesainya penyusunan skripsi dan semua data yang terkumpul, maka penulis ingin memberikan saran kepada beberapa pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Baitul Mal wat Tamwil Alfa Nusa Kebumen sekiranya menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia umumnya semua akad yang ada, khususnya akad *Musyarakah*.
2. Baitul Mal wat Tamwil Alfa Nusa Kebumen lebih mengoptimalkan kembali akad

Musyarakah karena akad *Musyarakah* dilihat dari aplikasinya partisipasi antara kedua belah mitra yang melakukan kerjasama memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan baik dalam pembagian keuntungan maupun kerugian dan setiap mitra mempunyai tugas masing-masing.

3. Dan, Baitul Mal wat Tamwil bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan mengunggulkannya menjalankan akad pembiayaan *Musyarakah* agar perekonomian dalam bidang mikro berbasis syariah dapat berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari dan Priansa, Donni Juni. 2009. *Menejemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Pratik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asro, Muhamad dan Kholid, Muhamad. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bakdiah, Khoirul. 2008. Penerapan Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Dan Musyarakah (Studi Kasus Pada BMT- MMU Sidogiri Pasuruan). Universits Islam Negeri Malang. (<http://lib.uin-malang.ac.id>), diakses tanggal 11 Maret 2014.
- H. Veithzal Rivai, Dkk. 2012. *Islamic Business and Ecoonomic Ethic Mengacu pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ilmi SM, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Indonesia, Bank. 1999. *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan kantor Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ismanto, Kuat. 2009. *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keaungan Syari'ah*. Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- Khasana, Jamilatun. 2008. Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah Wal Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik dalam Produk Kongsi Pemilikan Rumah Syariah (Kprs) pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo. Universitas Sebelas Maret Surakarta. (<http://eprints.uns.ac.id>), diakses tanggal 11 Maret 2014.
- Kutha Ratna, Nyoman. 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Majelis Ulama Indonesia. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

M Subana, Dkk. 2011. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Setia Pustaka.
Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.

Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Muhammad. 2008. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rusdianto, Reno. 2012. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Al-Bina Tasikmalaya. Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. (<http://www.fshuinsgd.ac.id>), diakses tanggal 11 Maret 2014.

Suriyani, Neni. 2013. Penerapan Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Pada Bank Muamalat Cabang Pontianak. Universitas Tanjungpura. (<http://junal.untan.ac.id>), diakses tanggal 11 Maret 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.